

STRATEGI KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA DENGAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Desi Julianti

*Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
(DPMPTSPTK) Kota Lhokseumawe, Indonesia*

E-mail : deshifa78@gmail.com

ABSTRAK

Dalam era digitalisasi yang semakin pesat, penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pelayanan publik melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dengan fokus pada aplikasi OSS RBA dan SI CANTIK CLOUD, penelitian ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, seperti kesalahan cetak, lamanya waktu pelayanan, dan kurangnya pemahaman pemohon terhadap alur proses. Melalui pendekatan evaluatif, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang meliputi pengembangan sistem yang lebih andal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan langkah-langkah keamanan siber yang tepat. Diharapkan, dengan implementasi strategi kebijakan yang efektif, pelayanan publik dapat ditingkatkan, dan pengawasan perizinan usaha dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah.

Kata Kunci: *Pelayanan Publik, Pengawasan Perizinan, Teknologi Informasi, Sicantik, dan Digitalisasi.*

ABSTRACT

In the era of increasingly rapid digitalization, strengthening public services and supervision of business licensing is very important to improve efficiency and transparency in government. This study aims to analyze policy strategies that can be applied to strengthen public services through the use of information technology-based applications. Focusing on the OSS RBA and SI CANTIK CLOUD application, this study explores the challenges faced, such as printing errors, long service times, and lack of applicant understanding of the process flow. Through an evaluative approach, this study recommends improvement steps that include developing a more reliable system, increasing human

resource capacity, and implementing appropriate cybersecurity measures. It is hoped that with the implementation of effective policy strategies, public services can be improved, and supervision of business licensing can be carried out in a more transparent and accountable manner, thereby supporting economic growth and investment in the regions.

Keywords: *Public Services, Licensing Supervision, Information Technology, Sicantik, and Digitalization.*

PENDAHULUAN

Strategi kebijakan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha dengan aplikasi berbasis teknologi informasi merupakan langkah yang sangat penting dalam konteks modernisasi administrasi pemerintahan Kota Lhokseumawe. Dalam era digital saat ini, di mana teknologi informasi berkembang dengan pesat, pemerintahan Kota Lhokseumawe dituntut untuk beradaptasi dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua aspek pelayanan publik dan perizinan dapat berjalan dengan baik, efisien, dan memenuhi harapan masyarakat. (Engkus, et al, 2019)

Salah satu aspek fundamental dari strategi ini adalah integrasi data dan sistem. Dalam banyak kasus, pemerintahan Kota Lhokseumawe memiliki berbagai aplikasi dan sistem yang beroperasi secara terpisah, yang sering kali menyebabkan inefisiensi dan kebingungan bagi masyarakat.

Misalnya, seorang pengusaha yang ingin mengajukan izin usaha mungkin harus berurusan dengan beberapa instansi yang berbeda, masing-masing dengan sistem dan prosedur yang berbeda pula. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintahan Kota Lhokseumawe perlu mengembangkan sistem yang terintegrasi, di mana semua data dan aplikasi terkait perizinan dapat diakses dalam satu platform. (Ahmad, et al, 2022)

Dengan cara ini, proses pengajuan izin dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau aplikasi super juga menjadi langkah strategis yang sangat penting. Aplikasi super ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dan data lintas instansi dalam satu platform yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat tidak perlu lagi mengakses berbagai aplikasi yang berbeda untuk mendapatkan informasi atau melakukan pengajuan perizinan. Sebagai contoh, aplikasi super dapat mencakup berbagai layanan seperti pendaftaran izin usaha, pengajuan izin

lingkungan, dan layanan perpajakan dalam satu antarmuka yang user-friendly. Hal ini tidak hanya akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan Kota Lhokseumawe. (Engvall, et al, 2022)

Strategi kebijakan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan berusaha dengan aplikasi berbasis teknologi informasi di Kota Lhokseumawe merupakan inisiatif yang sangat penting dalam konteks modernisasi administrasi publik. Dalam era digital saat ini, kebutuhan akan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan semakin mendesak. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan pengawasan perizinan tidak hanya menjadi pilihan, tetapi juga suatu keharusan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (Arifai, et al, 2024)

Kota Lhokseumawe, sebagai salah satu kota yang sedang berkembang di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam hal pelayanan publik dan perizinan. Proses perizinan yang panjang dan rumit sering kali menjadi penghambat bagi para pelaku usaha, baik yang baru memulai maupun yang sudah beroperasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan mengurangi minat investasi di daerah tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah Kota Lhokseumawe kota perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki sistem yang ada.

Salah satu langkah awal yang diambil adalah melakukan analisis mendalam terhadap sistem pelayanan publik dan perizinan yang ada saat ini. Melalui analisis ini, pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang ada, seperti waktu tunggu yang lama, kurangnya transparansi, dan kesulitan dalam mengakses informasi. Dengan pemahaman yang jelas tentang tantangan yang dihadapi, pemerintah Kota Lhokseumawe dapat merancang solusi yang tepat dan efektif.

Penerapan aplikasi berbasis teknologi informasi menjadi salah satu solusi utama dalam strategi ini. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan perizinan. Melalui platform digital, masyarakat dapat melakukan pendaftaran izin usaha secara online, mengunggah dokumen yang diperlukan, dan memantau status permohonan mereka. Hal ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi beban administratif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka tanpa harus terjebak dalam proses birokrasi yang rumit. (Arifai, et al, 2024)

Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat pengawasan

yang efektif. Dalam proses perizinan, setiap langkah dapat dipantau secara real-time oleh pemerintahan Kota Lhokseumawe. Ini memungkinkan pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan dalam proses perizinan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Misalnya, jika terdapat keterlambatan dalam proses verifikasi dokumen, pemerintah Kota Lhokseumawe dapat segera menindaklanjuti dan mencari solusi untuk mempercepat proses tersebut. Dengan demikian, transparansi dalam proses perizinan dapat ditingkatkan, dan masyarakat dapat melihat dengan jelas tahapan yang harus dilalui serta waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin.

Pentingnya transparansi dalam proses perizinan tidak dapat diabaikan. Dengan adanya aplikasi berbasis teknologi informasi, masyarakat dapat mengakses informasi terkait perizinan dengan lebih mudah. Mereka dapat mengetahui persyaratan yang diperlukan, biaya yang harus dibayarkan, serta estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Lhokseumawe, tetapi juga mengurangi potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat lebih mudah melaporkan jika terjadi

penyimpangan dalam proses perizinan.

Selanjutnya, untuk memastikan keberhasilan implementasi aplikasi ini, pemerintah Kota Lhokseumawe perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pegawai yang terlibat dalam pelayanan publik dan pengawasan perizinan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang penggunaan aplikasi, serta pentingnya pelayanan yang berkualitas. Pegawai yang terlatih akan lebih siap untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat dan menangani berbagai pertanyaan atau masalah yang mungkin timbul selama proses perizinan. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan motivasi pegawai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, karena mereka merasa lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi yang baru.

Kolaborasi antara pemerintah Kota Lhokseumawe, masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan publik. Dengan mendengarkan masukan dari masyarakat, pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka, serta menyesuaikan layanan yang diberikan. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dalam pengembangan aplikasi dan teknologi

informasi juga dapat mempercepat implementasi dan meningkatkan kualitas layanan. Sektor swasta dapat memberikan masukan berharga tentang kebutuhan pengguna dan membantu dalam pengembangan fitur-fitur yang relevan dalam aplikasi. (Arifai, et al, 2024)

Evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan dapat tercapai. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari sistem yang telah diterapkan, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan di masa depan. Evaluasi ini juga dapat melibatkan umpan balik dari masyarakat, sehingga pemerintah Kota Lhokseumawe dapat memahami pengalaman pengguna dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Dalam jangka panjang, strategi kebijakan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan berusaha dengan aplikasi berbasis teknologi informasi di Kota Lhokseumawe diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pelayanan yang lebih baik dan proses perizinan yang lebih efisien, diharapkan akan ada peningkatan minat investasi di daerah tersebut. Hal ini akan berdampak positif pada

penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, strategi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga pada penciptaan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, Kota Lhokseumawe dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah Kota Lhokseumawe, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai dan memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh masyarakat Kota Lhokseumawe. (Arifai, et al, 2024)

Berikut ini merupakan daerah yang menggunakan aplikasi sicantik sebagai aplikasi yang berbasis teknologi dan informasi

Di Indonesia sendiri pada triwulan pertama di 2024, sudah diterbitkan 8 juta NIB dengan rincian sebagai berikut :

No	JENIS NIB	JUMLAH
1	NIB usaha kecil	202.249 NIB
2	NIB usaha besar	52.247 NIB
3	NIB usaha menengah	24.897 NIB

Berdasarkan pendahuluan di atas, identifikasi masalah yang dapat dilakukan merupakan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan aspek keamanan siber dalam pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi
2. Penggunaan aplikasi yang berbasis teknologi dan informasi belum merata di seluruh wilayah di Indonesia
3. Kurangnya minat dan juga pengetahuan tentang aplikasi – aplikasi tersebut
4. Pengguna aplikasi atau masyarakat tidak serta merta menginginkan aplikasi tersebut karena dinilai lebih sulit daripada yang biasa mereka lakukan
5. Pemerintahan Kota Lhokseumawe kurang memberikan edukasi yang jelas tentang bagaimana kegunaan dan manfaat aplikasi tersebut.

No.	Nama Daerah	Jumlah Izin
1	Kab. Lampung Timur	14.148
2	Kota Medan	13.222
3	Kabupaten Agam	11.970
4	Kota Gorontalo	8.848
5	Kabupaten Gowa	8.815
6	Kab. Muaro Jambi	8.364
7	Kota Lhokseumawe	7.270
8	Kab. Purwakarta	6.585
9	Kota Kendari	6.353
10	Kota Banda Aceh	6.158

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan merupakan pemeliharaan aspek keamanan siber dalam pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi, penggunaan aplikasi yang berbasis teknologi dan informasi belum merata di seluruh wilayah di Indonesia, kurangnya minat dan juga pengetahuan tentang manfaat aplikasi – aplikasi tersebut, pengguna aplikasi atau masyarakat tidak serta merta menginginkan aplikasi tersebut karena dinilai lebih sulit daripada yang biasa mereka lakukan, dan pemerintahan Kota Lhokseumawe kurang memberikan edukasi yang jelas tentang bagaimana kegunaan dan manfaat aplikasi.

Adapun Manfaat Penelitian Yaitu :

- Manfaat teoritis
- Hasil dari penelitian ini dapat menemukan bagaimana strategi

penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan berusaha dengan aplikasi berbasis teknologi informasi.

- Manfaat praktis
Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis untuk penelitian yang akan datang
- Manfaat sosial
Penelitian ini dapat dijadikan sumber atau pertimbangan kedepannya untuk melakukan strategi baru yang akan dilakukan

KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori dalam penelitian mengenai strategi kebijakan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha dengan aplikasi berbasis teknologi informasi mencakup berbagai konsep, teori, dan kerangka kerja yang saling terkait. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan Kota Lhokseumawe yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang baik tidak hanya mencakup aspek kualitas dan kecepatan, tetapi juga harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi menjadi sangat relevan dalam era digital saat ini. (Engkus, et al, 2019)

Pertama, konsep pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai segala bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintahan Kota Lhokseumawe kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum. Pelayanan publik yang efektif dan efisien menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan Kota Lhokseumawe. Dalam konteks ini, digitalisasi pelayanan publik melalui teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyampaian layanan kepada masyarakat. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk mengelola data dan informasi dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Ahmad, et al, 2022)

Teori administrasi publik menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Administrasi publik berfokus pada bagaimana pemerintahan Kota Lhokseumawe mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintahan Kota Lhokseumawe. Digital government atau pemerintahan Kota Lhokseumawe

digital merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pemerintahan Kota Lhokseumawe, yang mencakup pengelolaan data, komunikasi, dan interaksi antara pemerintahan Kota Lhokseumawe dan masyarakat. Menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), digital government adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintahan Kota Lhokseumawe dan masyarakat.

Selanjutnya, teori inovasi juga relevan dalam konteks penguatan pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik dapat diartikan sebagai penerapan ide-ide baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Dalam hal ini, aplikasi berbasis teknologi informasi seperti Sistem Pelayanan Izin Terbuka Elektronik () diharapkan dapat menjadi inovasi yang mampu mengatasi berbagai kendala dalam proses perizinan usaha. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan mempercepat proses administrasi, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi inovasi tersebut. Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam

proses, struktur organisasi, dan budaya kerja di dalam instansi pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Teori pengawasan juga menjadi bagian integral dari landasan teori ini. Pengawasan dalam konteks perizinan usaha bertujuan untuk memastikan bahwa proses perizinan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya aplikasi berbasis teknologi informasi, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, karena data dan informasi dapat diakses secara real-time. Hal ini memungkinkan pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses perizinan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif kepada pelaku usaha. Pengawasan yang baik juga dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kota Lhokseumawe. (Engvall, et al, 2022)

Selain itu, teori partisipasi masyarakat juga penting untuk dipertimbangkan. Partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan Kota Lhokseumawe. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi layanan, pemerintahan Kota Lhokseumawe

dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi akan lebih efektif dalam mencapai tujuan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan mengenai digitalisasi pelayanan publik telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Kota Lhokseumawe Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan ini menekankan pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik. Namun, meskipun telah ada kebijakan yang mendukung, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, dan ketidakpahaman masyarakat terhadap teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi kebijakan yang dapat

mengatasi kendala-kendala tersebut dan memperkuat pelayanan publik serta pengawasan perizinan usaha melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Lebih jauh lagi, teori sistem juga dapat digunakan untuk memahami interaksi antara berbagai elemen dalam proses pelayanan publik dan pengawasan perizinan. Teori sistem menekankan pentingnya melihat suatu fenomena sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar, di mana setiap elemen saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks ini, aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam sistem pelayanan publik yang lebih luas, yang melibatkan pemerintahan Kota Lhokseumawe, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan memahami interaksi antara elemen-elemen ini, pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat merancang kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. (Engvall, et al, 2022)

Dalam rangka mencapai tujuan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha, penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis kualitatif dan kuantitatif, survei, dan studi kasus. Melalui evaluasi, pemerintahan Kota

Lhokseumawe dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi yang baik juga dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Secara keseluruhan, landasan teori ini menunjukkan bahwa penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha melalui aplikasi berbasis teknologi informasi memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai aspek seperti administrasi publik, inovasi, pengawasan, partisipasi masyarakat, dan teori sistem. Dengan memahami teori-teori ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha di era digital. (Ahmad, et al, 2022)

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam analisa ini adalah kuantitatif dan deskriptif. Bahan dan referensi yang digunakan merupakan dari

referensi data sekunder dengan referensi lima tahun terakhir sebagai bahan acuannya. Rumus yang digunakan merupakan rumus kuantitatif deskriptif. Hipotesisnya diharapkan dapat menemukan strategi baru untuk dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manfaat Penggunaan Aplikasi Teknologi Informasi

Penggunaan aplikasi teknologi informasi di kota Lhokseumawe membawa berbagai manfaat yang signifikan. Salah satu manfaat utama adalah peningkatan efisiensi dalam pelayanan publik. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu, teknologi informasi juga memungkinkan pemerintahan Kota Lhokseumawe daerah untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real-time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lebih akurat dan terkini. (Arifai, et al, 2024)

Hal ini berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya publik. Di sektor pendidikan, aplikasi teknologi informasi dapat mendukung pembelajaran jarak jauh, memberikan akses yang lebih luas

kepada siswa dan mahasiswa untuk mendapatkan materi pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, masyarakat Lhokseumawe dapat merasakan manfaat yang lebih besar dari layanan publik yang lebih baik dan pendidikan yang lebih berkualitas. Penggunaan aplikasi teknologi informasi untuk pelayanan dan perizinan publik memberikan banyak manfaat yang signifikan bagi pemerintahan Kota Lhokseumawe maupun masyarakat. (Arifai, et al, 2024)

Secara umum, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelayanan publik. Salah satu manfaat utama adalah kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan adanya aplikasi berbasis teknologi informasi, masyarakat dapat mengakses layanan publik kapanpun dan dimanapun tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan Kota Lhokseumawe. Hal ini tentunya sangat memudahkan masyarakat dan menghemat waktu serta biaya transportasi.

Masyarakat cukup mengakses aplikasi melalui smartphone atau komputer untuk mendapatkan informasi, mengajukan permohonan, atau melakukan pembayaran terkait layanan publik. Kemudahan akses ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari kantor pemerintahan Kota Lhokseumawe. OSS RBA / Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPPPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Selain itu, penggunaan aplikasi teknologi informasi juga dapat mempercepat proses pelayanan publik. Dengan sistem yang terintegrasi dan terkomputerisasi, proses administrasi dan verifikasi data dapat dilakukan secara lebih cepat dibandingkan sistem manual. Hal ini tentunya akan sangat menghemat waktu baik bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Sementara bagi petugas, beban kerja administratif dapat berkurang sehingga bisa lebih fokus pada pelayanan yang bersifat substantif.

Manfaat lainnya adalah peningkatan akurasi data dan konsistensi layanan. Dengan sistem yang terkomputerisasi, risiko kesalahan input data atau inkonsistensi dalam pemberian layanan dapat diminimalisir. Data-data pemohon layanan tersimpan dengan baik dalam database sehingga memudahkan proses verifikasi dan pelacakan riwayat layanan. Hal ini tentunya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. (Engvall, et al, 2022)

Dari sisi transparansi, penggunaan aplikasi teknologi informasi juga sangat bermanfaat. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait prosedur, persyaratan, biaya, dan estimasi waktu penyelesaian suatu layanan. Selain itu, status dan progress dari permohonan layanan juga dapat dipantau secara real-time oleh pemohon. Transparansi ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Lhokseumawe serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang atau praktik korupsi.

Manfaat lainnya adalah efisiensi anggaran. Meskipun di awal membutuhkan investasi yang cukup besar untuk pengembangan sistem dan infrastruktur, dalam jangka panjang penggunaan aplikasi teknologi informasi justru dapat menghemat anggaran pemerintahan Kota Lhokseumawe. Pengurangan

penggunaan kertas (paperless), efisiensi SDM, dan penyederhanaan proses bisnis akan berdampak pada penghematan anggaran operasional pelayanan publik.

Dari sisi akuntabilitas, penggunaan aplikasi teknologi informasi juga sangat membantu. Seluruh aktivitas pelayanan publik terekam dengan baik dalam sistem sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi dan audit. Pimpinan dapat dengan mudah memantau kinerja unit pelayanan dan mengambil kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas layanan. Hal ini tentunya akan mendorong peningkatan performa aparatur dalam memberikan pelayanan publik.

Manfaat lainnya adalah kemudahan dalam pengumpulan dan analisis data. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat dengan mudah mengumpulkan berbagai data terkait pelayanan publik seperti jumlah pemohon, jenis layanan yang paling banyak diakses, waktu rata-rata penyelesaian layanan, dan sebagainya. Data-data ini sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penggunaan aplikasi teknologi informasi juga memungkinkan integrasi layanan antar instansi pemerintahan Kota Lhokseumawe.

Dengan sistem yang terhubung, pertukaran data dan informasi antar instansi menjadi lebih mudah sehingga masyarakat tidak perlu bolak-balik ke berbagai instansi untuk mendapatkan layanan yang saling terkait. Hal ini tentunya akan sangat memudahkan masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik secara keseluruhan.

Selain itu, aplikasi teknologi informasi juga memungkinkan pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk memberikan layanan yang lebih personal dan customized sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan analisis data yang baik, pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari berbagai segmen masyarakat dan menyediakan layanan yang sesuai. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. (Ahmad, et al, 2022)

Manfaat lainnya adalah kemudahan dalam melakukan pembaruan kebijakan atau prosedur layanan. Dengan sistem yang terkomputerisasi, pembaruan kebijakan atau prosedur dapat langsung diimplementasikan dalam sistem tanpa perlu mencetak ulang berbagai formulir atau dokumen. Hal ini tentunya akan meningkatkan fleksibilitas pemerintahan Kota Lhokseumawe dalam merespon berbagai perubahan dan kebutuhan

masyarakat.

Penggunaan aplikasi teknologi informasi juga memungkinkan penyediaan layanan publik 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Masyarakat dapat mengakses informasi atau mengajukan permohonan layanan kapanpun tanpa dibatasi jam kerja kantor. Hal ini tentunya sangat memudahkan masyarakat terutama mereka yang memiliki kesibukan di jam kerja normal. (Engvall, et al, 2022)

Dari sisi keamanan data, penggunaan aplikasi teknologi informasi juga memberikan manfaat. Dengan sistem keamanan yang baik, data-data penting terkait layanan publik dapat terlindungi dengan lebih baik dibandingkan penyimpanan secara manual. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan data-data pribadi yang diperlukan dalam proses layanan publik. Manfaat lainnya adalah kemudahan dalam melakukan survei kepuasan masyarakat. Melalui aplikasi, pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat dengan mudah mendistribusikan kuesioner kepuasan layanan dan mengumpulkan umpan balik dari masyarakat. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Penggunaan aplikasi teknologi informasi juga memungkinkan penyediaan layanan publik yang

lebih inklusif. Dengan fitur-fitur khusus seperti text-to-speech atau tampilan yang mudah dibaca, aplikasi dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat berkebutuhan khusus sehingga mereka juga dapat mengakses layanan publik dengan mudah.

2. Hal Negatif Yang Kemungkinan Terjadi

Salah satu risiko utama adalah masalah keamanan siber. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, potensi serangan siber juga meningkat, yang dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi dan informasi sensitif. Selain itu, jika infrastruktur teknologi informasi tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi gangguan layanan yang berdampak pada masyarakat. Misalnya, jika sistem mengalami downtime atau kesalahan teknis, maka layanan publik yang seharusnya berjalan lancar bisa terhambat, menyebabkan frustrasi di kalangan pengguna. (Arifai, et al, 2024)

Selain itu, ada juga risiko ketidakmerataan akses terhadap teknologi informasi, di mana sebagian masyarakat mungkin tidak memiliki kemampuan atau akses untuk memanfaatkan teknologi ini, sehingga menciptakan kesenjangan digital. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi dan informasi, meskipun menawarkan banyak manfaat, juga memiliki sejumlah hal negatif yang

perlu diperhatikan. Berikut adalah penjelasan secara mendalam mengenai beberapa dampak negatif dari penggunaan aplikasi tersebut;

Salah satu dampak negatif yang paling mencolok adalah ketergantungan yang meningkat pada teknologi. Pengguna sering kali menjadi sangat bergantung pada aplikasi untuk melakukan tugas sehari-hari, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk berfungsi tanpa teknologi. Ketergantungan ini dapat menyebabkan masalah ketika aplikasi mengalami gangguan atau ketika pengguna tidak memiliki akses ke perangkat yang diperlukan. (Castro, et al, 2022)

Aplikasi berbasis teknologi sering kali mengumpulkan data pribadi pengguna, yang dapat menimbulkan risiko keamanan dan privasi. Data yang dikumpulkan dapat disalahgunakan oleh pihak ketiga, baik untuk tujuan komersial maupun kriminal. Kasus kebocoran data dan serangan siber semakin meningkat, dan pengguna sering kali tidak menyadari seberapa banyak informasi pribadi yang mereka bagikan dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi dapat memperlebar kesenjangan digital antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Masyarakat yang kurang terdidik atau yang tinggal di daerah terpencil mungkin tidak

memiliki akses yang sama terhadap teknologi, sehingga mereka tertinggal dalam hal informasi dan layanan yang ditawarkan oleh aplikasi. Hal ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. (Engvall, et al, 2022)

Aplikasi berbasis teknologi dapat mengurangi interaksi sosial tatap muka. Pengguna mungkin lebih memilih berkomunikasi melalui aplikasi daripada bertemu langsung, yang dapat mengurangi kualitas hubungan interpersonal. Interaksi sosial yang terbatas dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional individu, menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi.

Meskipun aplikasi dirancang untuk meningkatkan efisiensi, sering kali terdapat masalah dalam kualitas layanan. Misalnya, aplikasi dapat mengalami bug, kesalahan sistem, atau downtime yang dapat mengganggu layanan. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi bagi pengguna dan mengurangi kepercayaan mereka terhadap aplikasi dan penyedia layanan.

Tidak semua pengguna memiliki tingkat literasi digital yang sama. Banyak orang, terutama yang lebih tua atau yang tidak terbiasa dengan teknologi, mungkin kesulitan dalam menggunakan aplikasi. Kurangnya pemahaman tentang cara kerja aplikasi dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan

pengalaman negatif dan ketidakpuasan.

Meskipun banyak aplikasi yang tersedia secara gratis, sering kali terdapat biaya tersembunyi yang terkait dengan penggunaannya. Misalnya, aplikasi mungkin menawarkan fitur dasar secara gratis tetapi mengenakan biaya untuk fitur premium. Pengguna mungkin tidak menyadari biaya ini sampai mereka sudah terlibat, yang dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak terduga.

Penggunaan aplikasi, terutama yang berkaitan dengan media sosial dan hiburan, dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Pengguna yang menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dapat mengalami masalah kesehatan seperti gangguan tidur, masalah penglihatan, dan penurunan aktivitas fisik. Selain itu, paparan konten negatif atau beracun di media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental pengguna. (Castro, et al, 2022)

Aplikasi berbasis teknologi, terutama yang berkaitan dengan media sosial, dapat menjadi saluran penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Pengguna sering kali tidak memverifikasi informasi sebelum membagikannya, yang dapat menyebabkan kebingungan dan kepanikan di masyarakat. Penyebaran informasi yang salah dapat memiliki konsekuensi serius, terutama dalam situasi krisis.

Dalam konteks pekerjaan, penggunaan aplikasi berbasis teknologi dapat mengurangi kualitas pekerjaan. Misalnya, jika pekerjaan tertentu diotomatisasi melalui aplikasi, hal ini dapat mengurangi keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selain itu, pekerja mungkin merasa tertekan untuk selalu tersedia dan responsif, yang dapat mengganggu keseimbangan kerja-hidup mereka. (Engkus, et al, 2019)

Meskipun aplikasi berbasis teknologi dan informasi menawarkan banyak keuntungan, penting untuk menyadari dan mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul. Pemerintahan Kota Lhokseumawe, pengembang aplikasi, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengurangi risiko ini melalui pendidikan, kebijakan yang tepat, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan dan privasi. Dengan pendekatan yang seimbang, kita dapat memaksimalkan manfaat teknologi sambil meminimalkan dampak negatifnya.

3. Hal Positif Penggunaan Aplikasi

Di sisi positif, penggunaan aplikasi teknologi informasi di Kota Lhokseumawe juga dapat mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan adanya platform digital, pelaku usaha kecil dan menengah dapat memasarkan produk mereka secara online, menjangkau

pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Arifai, et al, 2024)

Selain itu, teknologi informasi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, seperti melalui aplikasi pengaduan atau platform e-participation, di mana warga dapat memberikan masukan dan saran secara langsung kepada pemerintah. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah dalam memahami kebutuhan dan harapan warganya. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi dan informasi telah membawa banyak perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. (Arifai, et al, 2024)

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai beberapa manfaat utama dari penggunaan aplikasi tersebut; Aplikasi berbasis teknologi memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Dengan hanya beberapa klik, pengguna dapat menemukan data, berita, dan sumber daya yang mereka butuhkan. Ini sangat bermanfaat dalam pendidikan, di mana siswa dapat mengakses materi pembelajaran, penelitian, dan sumber daya tambahan secara online, meningkatkan proses belajar mereka.

Aplikasi teknologi sering kali

dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam konteks bisnis, aplikasi manajemen proyek, perangkat lunak akuntansi, dan alat kolaborasi memungkinkan tim untuk bekerja lebih efektif, mengelola waktu dengan lebih baik, dan menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan hasil kerja.

Aplikasi berbasis teknologi telah merevolusi cara orang berkomunikasi. Dengan aplikasi pesan instan, video call, dan platform media sosial, individu dapat terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dalam waktu nyata. Ini tidak hanya memperkuat hubungan pribadi tetapi juga memungkinkan kolaborasi profesional yang lebih baik, terlepas dari lokasi geografis. Pemerintahan Kota Lhokseumawe dan lembaga publik menggunakan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, aplikasi untuk pengajuan izin, pembayaran pajak, dan akses informasi publik membuat proses lebih transparan dan efisien. Digitalisasi layanan publik juga mengurangi birokrasi dan mempercepat waktu respon terhadap kebutuhan masyarakat.

Aplikasi berbasis teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan layanan yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Aplikasi kesehatan memungkinkan

pengguna untuk memantau kesehatan mereka, menjadwalkan janji temu, dan mengakses informasi medis. Aplikasi transportasi memudahkan perjalanan, sementara aplikasi belanja online memberikan kenyamanan dalam berbelanja. Aplikasi pendidikan telah membuka peluang bagi pembelajaran jarak jauh. Dengan platform e-learning, siswa dapat mengikuti kursus dari mana saja, mengakses materi pembelajaran, dan berinteraksi dengan pengajar serta teman sekelas secara virtual. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki akses ke pendidikan formal atau yang ingin melanjutkan pendidikan sambil bekerja. (Castro, et al, 2022)

Aplikasi berbasis teknologi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi, terutama di kalangan pengusaha kecil dan menengah. Platform e-commerce memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa memerlukan investasi besar dalam infrastruktur fisik. Selain itu, aplikasi keuangan membantu mereka mengelola keuangan, mengakses pinjaman, dan melakukan transaksi dengan lebih mudah. Aplikasi teknologi mendorong inovasi dan kreativitas. Dengan alat desain grafis, pengeditan video, dan pengembangan perangkat lunak yang tersedia, individu dan perusahaan dapat menciptakan produk dan layanan baru. Ini tidak hanya

meningkatkan daya saing tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Aplikasi berbasis teknologi memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang besar. Dalam konteks bisnis, analisis data membantu perusahaan memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi tren pasar, dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini juga berlaku dalam sektor publik, di mana data dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Aplikasi berbasis teknologi, terutama media sosial, telah meningkatkan kesadaran sosial dan mobilisasi masyarakat. Kampanye online dapat dengan cepat menyebar, mengedukasi masyarakat tentang isu-isu penting, dan mendorong tindakan kolektif. Ini memberikan platform bagi suara-suara yang mungkin tidak terdengar dalam konteks tradisional.

Aplikasi teknologi juga berkontribusi pada peningkatan keamanan. Misalnya, aplikasi pemantauan keamanan rumah memungkinkan pemilik untuk mengawasi properti mereka dari jarak jauh. Dalam konteks kesehatan, aplikasi pelacakan dapat membantu memantau penyebaran penyakit dan memberikan informasi penting kepada masyarakat.

Aplikasi berbasis teknologi memungkinkan fleksibilitas dalam bekerja dan belajar. Dengan akses ke aplikasi dari perangkat mobile, individu dapat bekerja dari mana saja,

mengatur jadwal mereka sendiri, dan menyesuaikan waktu kerja dengan kebutuhan pribadi. Ini sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi.

Penggunaan aplikasi berbasis teknologi dan informasi telah membawa banyak manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari peningkatan aksesibilitas informasi hingga inovasi dalam pelayanan publik, aplikasi ini telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan belajar. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, manfaat yang ditawarkan oleh aplikasi teknologi sangat besar dan berpotensi untuk terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat memaksimalkan potensi positif dari aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. (Engkus, et al, 2019)

4. Pemeliharaan Aspek Keamanan Siber

Pemeliharaan aspek keamanan siber dalam pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi merupakan suatu hal yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan. Dalam era digital yang semakin maju ini, ancaman keamanan siber terus berkembang dan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, setiap pengembang aplikasi harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek keamanan siber dan

menerapkannya secara konsisten dalam setiap tahap pengembangan aplikasi.

Dalam konteks pemeliharaan aspek keamanan siber di Kota Lhokseumawe, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur yang kuat dalam melindungi data dan sistem informasi. Ini termasuk pelatihan bagi pegawai tentang praktik keamanan siber yang baik, serta investasi dalam teknologi keamanan yang canggih untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber. Selain itu, kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti penyedia layanan keamanan siber, dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi mereka, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam melindungi informasi mereka sendiri. (Arifai, et al, 2024)

Salah satu aspek penting dalam pemeliharaan keamanan siber adalah penerapan prinsip "security by design". Prinsip ini menekankan bahwa keamanan harus diintegrasikan sejak awal proses pengembangan aplikasi, bukan sebagai tambahan di akhir. Dengan menerapkan prinsip ini, pengembang dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan keamanan sejak dini, sehingga dapat

menghemat waktu dan biaya yang mungkin diperlukan untuk memperbaiki masalah keamanan di kemudian hari. (Castro, et al, 2022)

Dalam tahap perencanaan dan desain aplikasi, pengembang perlu melakukan analisis risiko keamanan secara menyeluruh. Analisis ini meliputi identifikasi aset informasi yang perlu dilindungi, potensi ancaman yang mungkin terjadi, serta kerentanan yang ada dalam sistem. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pengembang dapat merancang strategi mitigasi risiko yang tepat dan mengintegrasikannya ke dalam desain aplikasi.

Salah satu aspek penting dalam desain keamanan aplikasi adalah implementasi kontrol akses yang kuat. Ini meliputi autentikasi, otorisasi, dan manajemen sesi yang aman. Sistem autentikasi yang kuat harus mampu memverifikasi identitas pengguna secara akurat, misalnya melalui kombinasi username dan password yang kuat, atau melalui metode autentikasi multi-faktor. Sementara itu, sistem otorisasi harus memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses data dan fungsi yang sesuai dengan hak akses mereka. Manajemen sesi yang aman juga penting untuk mencegah serangan seperti session hijacking atau session fixation.

Enkripsi data merupakan aspek lain yang sangat penting dalam keamanan aplikasi. Data sensitif,

baik yang disimpan (data at rest) maupun yang ditransmisikan (data in transit), harus dienkripsi menggunakan algoritma enkripsi yang kuat dan up-to-date. Pengembang juga perlu memastikan bahwa kunci enkripsi dikelola dengan baik dan aman. Dalam proses pengembangan aplikasi, pengembang harus selalu mengikuti praktik pengodean yang aman (secure coding practices). Ini meliputi validasi input yang ketat untuk mencegah serangan seperti SQL injection atau cross-site scripting (XSS), penanganan error yang aman untuk mencegah kebocoran informasi sensitif, serta pengelolaan memori yang baik untuk mencegah buffer overflow attacks.

Pengujian keamanan juga merupakan bagian integral dari pemeliharaan aspek keamanan siber dalam pengembangan aplikasi. Ini meliputi berbagai jenis pengujian seperti pengujian penetrasi (penetration testing), analisis kode statis dan dinamis, serta pengujian fuzz (fuzzing). Pengujian-pengujian ini harus dilakukan secara rutin dan menyeluruh untuk mengidentifikasi kerentanan yang mungkin ada dalam aplikasi.

Manajemen dependensi yang aman juga merupakan aspek penting dalam keamanan aplikasi. Pengembang perlu memastikan bahwa semua library dan framework yang digunakan dalam aplikasi selalu diperbarui ke versi terbaru yang

aman. Penggunaan alat manajemen dependensi yang dapat memindai dan melaporkan kerentanan dalam dependensi dapat sangat membantu dalam hal ini.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah keamanan dalam proses deployment dan operasional aplikasi. Ini meliputi konfigurasi server yang aman, penggunaan protokol komunikasi yang aman seperti HTTPS, serta implementasi firewall dan sistem deteksi intrusi (IDS) yang efektif. Logging dan monitoring juga merupakan komponen penting dalam pemeliharaan keamanan siber. Aplikasi harus memiliki sistem logging yang komprehensif untuk mencatat semua aktivitas penting, terutama yang berkaitan dengan keamanan. Log-log ini harus disimpan secara aman dan dianalisis secara rutin untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya serangan.

Manajemen patch dan pembaruan juga merupakan aspek krusial dalam pemeliharaan keamanan siber. Pengembang harus memiliki proses yang efektif untuk menerapkan patch keamanan dan pembaruan secara tepat waktu. Ini meliputi tidak hanya aplikasi itu sendiri, tetapi juga semua komponen sistem yang mendukungnya, termasuk sistem operasi, web server, database, dan lain-lain.

Edukasi dan pelatihan keamanan bagi tim pengembang juga

sangat penting. Teknologi keamanan siber terus berkembang, dan ancaman baru muncul setiap saat. Oleh karena itu, tim pengembang perlu terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka dalam hal keamanan siber. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan rutin, partisipasi dalam konferensi keamanan, atau program sertifikasi keamanan. Aspek penting lainnya adalah manajemen insiden keamanan. Meskipun upaya pencegahan sudah dilakukan, kemungkinan terjadinya insiden keamanan tetap ada. Oleh karena itu, tim pengembang harus memiliki rencana respons insiden yang jelas dan terlatih dalam menangani berbagai jenis insiden keamanan.

Privasi data juga merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari keamanan siber. Dengan adanya berbagai regulasi privasi data seperti GDPR atau CCPA, pengembang aplikasi harus memastikan bahwa aplikasi mereka mematuhi prinsip-prinsip privasi seperti minimalisasi data, persetujuan pengguna, dan hak pengguna atas data mereka. Keamanan dalam pengembangan aplikasi mobile juga perlu mendapat perhatian khusus. Aplikasi mobile memiliki tantangan keamanan yang unik, seperti keamanan penyimpanan lokal, keamanan komunikasi dengan backend server, serta risiko terkait dengan perangkat yang hilang atau dicuri.

Dalam konteks aplikasi

berbasis cloud, ada aspek-aspek keamanan tambahan yang perlu diperhatikan. Ini meliputi keamanan dalam virtualisasi dan kontainerisasi, manajemen identitas dan akses yang tepat untuk layanan cloud, serta pemahaman yang jelas tentang model *shared responsibility* dengan penyedia layanan cloud. Keamanan dalam pengembangan aplikasi IoT (Internet of Things) juga menjadi semakin penting seiring dengan meluasnya adopsi teknologi IoT. Pengembang perlu memperhatikan aspek-aspek seperti keamanan komunikasi antar perangkat, keamanan firmware, serta manajemen kunci yang aman untuk perangkat IoT. (Elhaq, 2022)

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah keamanan dalam pengembangan aplikasi berbasis AI dan machine learning. Ini meliputi keamanan data training, perlindungan terhadap serangan adversarial, serta etika dan transparansi dalam penggunaan AI. Keamanan dalam pengembangan aplikasi blockchain juga memiliki tantangannya sendiri. Meskipun teknologi blockchain secara inheren menawarkan beberapa fitur keamanan, pengembang tetap perlu memperhatikan aspek-aspek seperti keamanan smart contract, manajemen kunci kriptografi yang aman, serta perlindungan terhadap serangan konsensus. (Castro, et al, 2022)

Dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis microservices, ada tantangan keamanan tambahan yang perlu dihadapi. Ini meliputi keamanan komunikasi antar services, manajemen identitas dan akses yang tepat untuk setiap service, serta orkestrasi keamanan dalam lingkungan yang terdistribusi. Keamanan dalam pengembangan aplikasi serverless juga memerlukan pendekatan yang berbeda. Pengembang perlu memahami model keamanan yang unik dalam arsitektur serverless dan menerapkan praktik-praktik keamanan yang sesuai.

Aspek penting lainnya adalah kepatuhan terhadap standar dan regulasi keamanan yang relevan. Ini bisa meliputi standar seperti ISO 27001, PCI DSS, atau HIPAA, tergantung pada jenis aplikasi dan industri yang dilayani. Pengembang perlu memastikan bahwa aplikasi mereka memenuhi semua persyaratan keamanan yang ditetapkan oleh standar-standar tersebut. Manajemen

risiko yang berkelanjutan juga merupakan bagian penting dari pemeliharaan aspek keamanan siber. Lingkungan ancaman siber terus berevolusi, dan risiko keamanan perlu dinilai ulang secara berkala. Ini melibatkan pembaruan analisis risiko, penyesuaian strategi mitigasi, dan pembaruan kebijakan dan prosedur keamanan sesuai kebutuhan. Akhirnya, budaya keamanan yang kuat dalam tim pengembangan sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek keamanan siber diperhatikan secara konsisten. Ini melibatkan tidak hanya penerapan praktik-praktik keamanan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keamanan di semua tingkatan tim. (Engkus, et al, 2019)

5. Jumlah Penggunaan Aplikasi

Berdasarkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus slovin sebagai acuan perhitungannya. Berikut ini merupakan hasil perhitungan penulis :

Rumus :	$1 + 8.131.284 (0,01)^2$
$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$	$91.733 = \frac{8.131.284}{1 + 661.177,794}$
$n =$ Ukuran pengguna	$91.733 = \frac{8.131.284}{761.177,794}$
$N =$ Ukuran jumlah yang diterbitkan	$91.733 = 8.131.284$
$E =$ Persentase Kelonggaran	
$91.733 = \frac{8.131.284}{\quad\quad\quad}$	

761.177,794

$91.733 = 10,68250291074571$

n adalah ukuran sampel yang kita cari, N adalah ukuran populasi total, dan e adalah margin error atau tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi. Dalam kasus ini, N adalah 8.131.284, yang merupakan jumlah populasi total, dan e adalah 0,01 atau 1%, yang menunjukkan tingkat presisi yang sangat tinggi. Populasi total sebesar 8.131.284, diambil sampel sebanyak 91.733 untuk mendapatkan hasil yang representatif dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dan margin error hanya 1%. Hasil akhir yang ditampilkan adalah 10,68250291074571.

Angka 91.733 ini memiliki implikasi penting. Ini menunjukkan bahwa meskipun populasi totalnya sangat besar (lebih dari 8 juta), kita hanya perlu mengambil sampel sekitar 91.733 untuk mendapatkan hasil yang dapat diandalkan. Persentase kelonggaran atau margin error sebesar 1% yang digunakan dalam perhitungan ini juga patut diperhatikan.

Ini adalah tingkat presisi yang sangat tinggi, yang menjelaskan mengapa ukuran sampel yang dihasilkan cukup besar. Jika kita meningkatkan margin error, misalnya menjadi 5%, ukuran sampel yang diperlukan akan jauh lebih kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa untuk

populasi sebesar 8.131.284, dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi (margin error 1%), dengan sampel sebesar 91.733. Ini adalah jumlah yang signifikan namun masih jauh lebih kecil daripada populasi total, mendemonstrasikan kekuatan dan efisiensi dari teknik sampling statistik.

6. Faktor Kurangnya Pengguna Aplikasi

Aplikasi berbasis teknologi dan informasi seringkali mengalami kurangnya peminat karena berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu penyebab utamanya adalah kesenjangan digital yang masih terjadi di masyarakat. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kelompok ekonomi lemah, memiliki smartphone atau komputer dengan koneksi internet yang stabil masih menjadi kemewahan. Hal ini tentunya membatasi akses mereka terhadap aplikasi berbasis teknologi, sehingga mereka lebih memilih metode konvensional dalam mendapatkan layanan atau informasi. (Engkus, et al, 2019)

Faktor lain yang berkontribusi terhadap kurangnya peminat adalah resistensi terhadap perubahan, terutama di kalangan masyarakat yang sudah terbiasa dengan sistem konvensional. Banyak orang merasa

nyaman dengan cara-cara lama yang sudah mereka kenal dan khawatir jika beralih ke sistem baru akan menyulitkan mereka. Hal ini terutama terjadi pada kelompok masyarakat yang lebih tua atau mereka yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. Mereka mungkin merasa bahwa belajar menggunakan aplikasi baru akan memakan waktu dan energi, sehingga lebih memilih untuk tetap menggunakan metode yang sudah mereka kenal meskipun mungkin tidak seefisien aplikasi berbasis teknologi.

Kurangnya literasi digital juga menjadi faktor penting yang menyebabkan rendahnya minat terhadap aplikasi berbasis teknologi. Banyak orang masih belum memahami cara mengoperasikan smartphone atau komputer secara optimal, apalagi menggunakan aplikasi-aplikasi khusus. Mereka mungkin merasa intimidasi oleh teknologi dan takut membuat kesalahan yang bisa berakibat fatal, terutama jika aplikasi tersebut berkaitan dengan hal-hal penting seperti keuangan atau dokumen pribadi. Ketakutan ini seringkali membuat mereka enggan untuk mencoba dan lebih memilih metode konvensional yang sudah mereka pahami dengan baik.

Masalah keamanan dan privasi data juga menjadi kekhawatiran bagi banyak orang sehingga mereka enggan menggunakan aplikasi berbasis teknologi. Maraknya kasus kebocoran

data dan penyalahgunaan informasi pribadi membuat banyak orang menjadi skeptis terhadap keamanan aplikasi online. Mereka khawatir data pribadi mereka akan jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Kekhawatiran ini seringkali membuat mereka lebih memilih metode konvensional yang dianggap lebih aman meskipun mungkin tidak seefisien. (Elhaq, 2022)

Kurangnya customization atau personalisasi dalam aplikasi. Faktor lain yang berkontribusi terhadap kurangnya peminat adalah desain aplikasi yang kurang user-friendly. Banyak aplikasi dikembangkan dengan fokus pada fitur dan fungsionalitas, namun kurang memperhatikan kemudahan penggunaan bagi pengguna awam. Interface yang rumit, navigasi yang membingungkan, atau penggunaan istilah-istilah teknis yang sulit dipahami seringkali membuat pengguna frustrasi dan akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini terutama menjadi masalah bagi kelompok masyarakat yang tidak terlalu akrab dengan teknologi. (Elhaq, 2022)

Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dan cara penggunaan aplikasi juga menjadi faktor penyebab rendahnya minat. Seringkali aplikasi diperkenalkan tanpa disertai kampanye edukasi yang memadai, sehingga masyarakat tidak

memahami nilai tambah yang bisa mereka dapatkan dari penggunaan aplikasi tersebut. Tanpa pemahaman yang jelas tentang manfaat yang akan mereka peroleh, banyak orang merasa tidak ada urgensi untuk beralih dari metode konvensional yang sudah mereka kenal. (Castro, et al, 2022)

Masalah teknis seperti bug, crash, atau lambatnya performa aplikasi juga dapat menurunkan minat pengguna. Pengalaman buruk dalam menggunakan aplikasi, seperti sering terjadi error atau lambatnya respon, dapat membuat pengguna frustrasi dan akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut lagi. Hal ini terutama menjadi masalah jika aplikasi tersebut berkaitan dengan layanan penting yang membutuhkan kecepatan dan keakuratan.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan alternatif yang lebih mudah atau lebih dikenal. Jika ada metode lain yang dianggap lebih simpel atau sudah sangat familiar bagi masyarakat, mereka mungkin akan lebih memilih metode tersebut dibandingkan harus belajar menggunakan aplikasi baru. Misalnya, jika untuk mendapatkan informasi tertentu masyarakat bisa langsung menelepon atau datang ke kantor terkait, mereka mungkin akan lebih memilih cara ini dibandingkan harus men-download dan belajar menggunakan aplikasi baru.

Kurangnya dukungan dan komitmen dari pihak-pihak terkait

juga dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap aplikasi. Jika instansi atau lembaga yang bertanggung jawab tidak memberikan dukungan penuh terhadap penggunaan aplikasi, misalnya masih mempertahankan sistem manual paralel, masyarakat mungkin akan merasa bahwa penggunaan aplikasi bukanlah suatu keharusan dan tetap memilih metode konvensional.

Faktor budaya juga dapat mempengaruhi minat terhadap aplikasi berbasis teknologi. Di beberapa masyarakat, ada preferensi kuat terhadap interaksi langsung atau tatap muka dalam mendapatkan layanan atau informasi. Mereka mungkin merasa bahwa menggunakan aplikasi menghilangkan elemen personal dalam layanan dan lebih memilih untuk berinteraksi langsung dengan petugas layanan. (Castro, et al, 2022)

Masalah konektivitas internet yang tidak stabil di banyak daerah juga menjadi faktor penghambat. Aplikasi yang membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk berfungsi optimal mungkin akan sulit digunakan di daerah-daerah dengan infrastruktur internet yang belum memadai. Hal ini dapat menyebabkan frustrasi dan akhirnya menurunkan minat untuk menggunakan aplikasi tersebut.

Faktor ekonomi juga perlu dipertimbangkan. Beberapa aplikasi mungkin memerlukan biaya berlangganan atau pembelian fitur

tertentu. Bagi sebagian masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, biaya tambahan ini mungkin dianggap sebagai beban dan membuat mereka enggan untuk menggunakan aplikasi tersebut. (Elhaq, 2022)

Kurangnya customization atau personalisasi dalam aplikasi juga dapat menurunkan minat. Aplikasi yang terlalu generik dan tidak dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna mungkin akan dianggap kurang relevan dan akhirnya ditinggalkan. Faktor bahasa juga dapat menjadi hambatan. Banyak aplikasi yang hanya tersedia dalam bahasa tertentu, seringkali bahasa Inggris, yang mungkin tidak dikuasai oleh sebagian besar masyarakat di suatu daerah. Hal ini tentunya akan membatasi akses dan menurunkan minat terhadap aplikasi tersebut.

Masalah kompatibilitas dengan perangkat yang dimiliki masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat. Jika aplikasi hanya bisa berjalan di perangkat tertentu atau membutuhkan spesifikasi yang tinggi, banyak orang mungkin tidak dapat menggunakannya karena keterbatasan perangkat yang mereka miliki. Kurangnya integrasi dengan sistem atau aplikasi lain yang sudah ada juga dapat menurunkan minat. Jika pengguna harus menggunakan banyak aplikasi terpisah untuk berbagai kebutuhan yang sebenarnya saling terkait, mereka mungkin akan merasa

overwhelmed dan akhirnya memilih untuk tidak menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. (Elhaq, 2022)

Faktor psikologis seperti kecemasan terhadap teknologi (technophobia) juga dapat berkontribusi terhadap rendahnya minat. Beberapa orang mungkin memiliki ketakutan atau kecemasan berlebihan terhadap penggunaan teknologi, yang membuat mereka enggan untuk mencoba aplikasi baru. Kurangnya insentif atau reward bagi pengguna aplikasi juga dapat mempengaruhi minat. Jika tidak ada keuntungan yang jelas atau insentif yang menarik bagi pengguna aplikasi dibandingkan dengan metode konvensional, banyak orang mungkin tidak melihat urgensi untuk beralih ke penggunaan aplikasi. Terakhir, faktor kebiasaan dan rutinitas juga berperan penting. Banyak orang sudah terbiasa dengan rutinitas tertentu dalam mendapatkan layanan atau informasi. Mengubah kebiasaan ini untuk beralih ke penggunaan aplikasi mungkin dianggap sebagai gangguan terhadap rutinitas yang sudah mapan, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap dengan cara-cara lama. (Castro, et al, 2022)

Semua faktor di atas saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap kurangnya peminat aplikasi berbasis teknologi dan informasi. Untuk meningkatkan minat dan adopsi terhadap aplikasi semacam ini, diperlukan pendekatan holistik yang

mempertimbangkan semua faktor tersebut. Mulai dari peningkatan infrastruktur dan akses teknologi, edukasi dan sosialisasi yang intensif, perbaikan desain dan user experience aplikasi, hingga pemberian insentif dan dukungan yang memadai bagi pengguna. Hanya dengan memahami dan mengatasi semua faktor ini secara komprehensif, kita dapat berharap untuk meningkatkan minat dan adopsi terhadap aplikasi berbasis teknologi dan informasi di masyarakat.

7. Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Publik Dan Pengawasan Perizinan Berusaha

Strategi kebijakan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan usaha di Lhokseumawe harus mencakup pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menerapkan sistem perizinan berbasis elektronik yang memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan izin dan memantau status permohonan mereka. Hal ini tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi. (Arifai, et al, 2024)

Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di instansi pemerintah

juga sangat penting, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Lhokseumawe dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (Arifai, et al, 2024)

1. Integrasi Data dan Sistem

Integrasi data dan sistem merujuk pada proses menggabungkan berbagai sumber data dan sistem informasi ke dalam satu kesatuan yang koheren. Dalam konteks pemerintahan Kota Lhokseumawe, ini berarti menghubungkan berbagai sistem yang digunakan oleh berbagai instansi pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk memastikan bahwa data dapat diakses dan digunakan secara efisien. Integrasi ini sangat penting karena memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya meningkatkan pengambilan keputusan dan pelayanan publik.

Manfaat Integrasi

- Efisiensi Operasional : Dengan mengintegrasikan sistem, pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat mengurangi duplikasi data dan proses, yang mengarah pada penghematan waktu dan biaya.
- Aksesibilitas Data : Data yang terintegrasi dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk pegawai pemerintahan Kota

Lhokseumawe, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum, sehingga meningkatkan transparansi.

- Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Data yang terintegrasi memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis bukti.

Tantangan dalam Integrasi

Meskipun ada banyak manfaat, integrasi data dan sistem juga menghadapi tantangan, seperti:

- Kompatibilitas Sistem: Berbagai sistem mungkin menggunakan format data yang berbeda, sehingga menyulitkan integrasi.
- Keamanan Data : Mengintegrasikan data dari berbagai sumber meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi.
- Biaya Implementasi : Proses integrasi sering kali memerlukan investasi yang signifikan dalam teknologi dan pelatihan.

2. Pengembangan Aplikasi Super

Aplikasi super adalah platform digital yang mengintegrasikan berbagai layanan dan fungsi dalam satu aplikasi. Dalam konteks pemerintahan Kota Lhokseumawe, aplikasi ini dapat mencakup layanan perizinan, pembayaran pajak, pengaduan masyarakat, dan banyak lagi, semua dalam satu antarmuka yang mudah digunakan.

Manfaat Pengembangan Aplikasi Super

- Kemudahan Akses: Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan Kota Lhokseumawe hanya dengan satu aplikasi, mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi berbagai kantor pemerintahan Kota Lhokseumawe.
- Peningkatan Pengalaman Pengguna : Dengan antarmuka yang intuitif dan fungsionalitas yang lengkap, aplikasi super dapat meningkatkan kepuasan pengguna.
- Pengumpulan Data yang Lebih Baik: Aplikasi ini dapat mengumpulkan data pengguna yang berharga, yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan di masa depan.

Tantangan dalam Pengembangan

- Keterbatasan Teknologi : Tidak semua daerah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung aplikasi super.
- Keterlibatan Pengguna : Masyarakat mungkin tidak terbiasa menggunakan aplikasi digital, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital.
- Keamanan dan Privasi : Pengembangan aplikasi super harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data pengguna untuk mencegah

penyalahgunaan.

3. Penerapan e-Government

e-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pelayanan publik, interaksi antara pemerintahan Kota Lhokseumawe dan masyarakat, serta efisiensi internal pemerintahan Kota Lhokseumawe. Ini mencakup berbagai inisiatif, mulai dari portal layanan online hingga sistem manajemen data.

Manfaat Penerapan e-Government

1. **Transparansi dan Akuntabilitas** : Dengan menyediakan informasi secara online, pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
2. **Peningkatan Efisiensi** : Proses yang sebelumnya manual dapat diotomatisasi, mengurangi waktu dan biaya operasional.
3. **Partisipasi Publik**: e-Government memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pemerintahan Kota Lhokseumawe, seperti melalui pengaduan online atau partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Tantangan dalam Penerapan

4. **Kesenjangan Digital** : Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi, yang dapat menciptakan kesenjangan

dalam pelayanan.

5. **Resistensi terhadap Perubahan** : Pegawai pemerintahan Kota Lhokseumawe mungkin enggan untuk beradaptasi dengan sistem baru, yang dapat menghambat implementasi.
6. **Biaya dan Sumber Daya** : Penerapan e-Government memerlukan investasi yang signifikan dalam infrastruktur dan pelatihan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (M&E) adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menilai kinerja program atau kebijakan. Dalam konteks pemerintahan Kota Lhokseumawe, M&E penting untuk memastikan bahwa inisiatif yang dilaksanakan mencapai tujuan yang diinginkan.

Manfaat M&E

- **Pengukuran Kinerja** : M&E memungkinkan pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk mengukur efektivitas program dan kebijakan, serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
- **Pengambilan Keputusan Berbasis Data** : Dengan data yang akurat, pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional.
- **Akuntabilitas** : Proses M&E meningkatkan akuntabilitas

kepada publik, karena pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat menunjukkan hasil dari inisiatif yang dilaksanakan.

Tantangan dalam M&E

- Keterbatasan Sumber Daya : Proses M&E memerlukan sumber daya yang cukup, baik dalam hal waktu maupun biaya.
- Kualitas Data : Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mengarah pada kesimpulan yang salah.
- Kompleksitas Proses : M&E yang efektif memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan tujuan program, yang bisa menjadi kompleks.

5. Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Kolaborasi antara pemerintahan Kota Lhokseumawe dan sektor swasta melibatkan kemitraan untuk mencapai tujuan bersama, seperti peningkatan layanan publik atau pengembangan infrastruktur. Ini dapat mencakup berbagai bentuk kerjasama, mulai dari kontrak layanan hingga kemitraan publik-swasta (PPP).

Manfaat Kolaborasi

- Inovasi dan Keahlian: Sektor swasta sering kali memiliki keahlian dan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintahan Kota

Lhokseumawe.

- Penghematan Biaya : Dengan melibatkan sektor swasta, pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat mengurangi beban biaya dan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- Peningkatan Layanan : Kolaborasi dapat menghasilkan layanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tantangan dalam Kolaborasi

- Perbedaan Tujuan : Sektor swasta dan pemerintahan Kota Lhokseumawe mungkin memiliki tujuan yang berbeda, yang dapat menyebabkan konflik.
- Risiko Keuangan : Kemitraan dengan sektor swasta dapat melibatkan risiko keuangan, terutama jika proyek tidak berjalan sesuai rencana.
- Transparansi dan Akuntabilitas : Penting untuk memastikan bahwa kolaborasi tetap transparan dan akuntabel kepada publik, untuk mencegah penyalahgunaan.

Dengan memahami setiap poin ini secara mendalam, kita dapat melihat bagaimana integrasi data, pengembangan aplikasi, penerapan e-government, monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi dengan sektor swasta dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik

dan efisiensi pemerintahan Kota Lhokseumawe.

8. Edukasi Pemerintahan Kota Lhokseumawe Terhadap Masyarakat

Edukasi pemerintahan kota Lhokseumawe terhadap masyarakat merupakan aspek penting dalam membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan warga. Proses edukasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah kota Lhokseumawe dalam memberikan edukasi kepada masyarakat adalah melalui penyelenggaraan berbagai program sosialisasi. Program ini biasanya dilakukan dalam bentuk seminar, lokakarya, atau pertemuan komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Dalam kegiatan ini, pemerintah menjelaskan berbagai kebijakan, peraturan, dan program yang sedang atau akan dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari program tersebut. (Arifai, et al, 2024)

Selain itu, pemerintah kota Lhokseumawe juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana edukasi. Dengan adanya platform digital, seperti website resmi pemerintah dan media sosial,

informasi mengenai kebijakan, layanan publik, dan kegiatan pemerintah dapat disampaikan secara cepat dan luas. Masyarakat dapat mengakses informasi ini kapan saja dan di mana saja, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui media sosial, pemerintah juga dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat, menjawab pertanyaan, dan menerima masukan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah kota Lhokseumawe juga berupaya untuk menjangkau masyarakat di tingkat yang lebih lokal melalui program-program edukasi berbasis komunitas. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan kelompok-kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan edukasi yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Misalnya, dalam konteks kesehatan, pemerintah dapat mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan penggunaan layanan kesehatan yang tersedia. Kegiatan ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan memanfaatkan layanan kesehatan yang ada. (Arifai, et al,

2024)

Edukasi pemerintahan juga mencakup pelatihan keterampilan bagi masyarakat, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Pemerintah kota Lhokseumawe dapat menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin memulai usaha kecil atau menengah. Dengan memberikan pelatihan ini, pemerintah tidak hanya membantu masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

Selain itu, penting bagi pemerintah kota Lhokseumawe untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Salah satu cara untuk melibatkan masyarakat adalah melalui forum-forum diskusi atau musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, saran, dan kritik terhadap kebijakan yang ada, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam merespons

kebutuhan masyarakat.

Edukasi pemerintahan kota Lhokseumawe terhadap masyarakat juga harus mencakup aspek kesadaran hukum. Pemerintah perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta tentang peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan memahami hak dan kewajiban mereka, masyarakat dapat lebih aktif dalam menegakkan hukum dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka. Kegiatan edukasi hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, atau penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.

Edukasi pemerintahan kota Lhokseumawe terhadap masyarakat merupakan proses yang berkelanjutan dan multidimensional. Melalui berbagai program sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan keterampilan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat membangun kesadaran, pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, menciptakan masyarakat yang lebih sadar, aktif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, edukasi

pemerintahan menjadi salah satu kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kota Lhokseumawe.

Edukasi mengenai penggunaan aplikasi teknologi informasi, terutama dalam konteks pelayanan publik seperti aplikasi di Kota Lhokseumawe, merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal. Proses edukasi ini tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, peningkatan pemahaman, dan pembentukan sikap positif terhadap teknologi. Dalam konteks ini, ada beberapa pendekatan yang dapat diambil untuk mengedukasi masyarakat agar lebih siap dan mampu menggunakan aplikasi teknologi informasi. (Castro, et al, 2022)

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa edukasi harus dimulai dengan analisis kebutuhan. Setiap kelompok masyarakat memiliki latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda-beda dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, sebelum merancang program edukasi, perlu dilakukan survei atau penelitian untuk mengidentifikasi tingkat literasi digital masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, kuesioner, atau diskusi kelompok terfokus. Dengan memahami

kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, program edukasi dapat disesuaikan agar lebih relevan dan efektif.

Setelah analisis kebutuhan dilakukan, langkah selanjutnya adalah merancang kurikulum edukasi yang komprehensif. Kurikulum ini harus mencakup berbagai aspek, mulai dari pengenalan dasar tentang teknologi informasi, cara menggunakan aplikasi, hingga pemahaman tentang manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi. Materi edukasi harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan disertai dengan contoh-contoh praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya, dalam konteks aplikasi , materi dapat mencakup langkah-langkah untuk mendaftar, mengisi formulir permohonan izin, dan cara melacak status permohonan.

Selanjutnya, metode pengajaran yang digunakan juga sangat penting. Pendekatan yang interaktif dan partisipatif cenderung lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah pelatihan langsung atau workshop. Dalam sesi ini, peserta dapat diajarkan cara menggunakan aplikasi secara langsung dengan bimbingan dari instruktur. Selain itu, penggunaan simulasi atau studi kasus juga dapat membantu peserta memahami bagaimana aplikasi

berfungsi dalam situasi nyata. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mendengar teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menggunakan teknologi.

Selain pelatihan langsung, penting juga untuk memanfaatkan berbagai media komunikasi untuk menyebarkan informasi. Dalam era digital saat ini, penggunaan media sosial, video tutorial, dan platform online lainnya dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Misalnya, video tutorial yang menunjukkan langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat diunggah ke platform seperti YouTube atau media sosial, sehingga masyarakat dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain itu, infografis yang menjelaskan proses penggunaan aplikasi dengan cara yang visual dan menarik juga dapat membantu masyarakat memahami informasi dengan lebih baik.

Salah satu aspek penting dalam edukasi adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Masyarakat perlu merasa nyaman dan percaya diri untuk bertanya dan berdiskusi tentang teknologi. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunitas atau kelompok belajar di mana individu dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Dalam konteks ini,

pemerintahan Kota Lhokseumawe atau lembaga terkait dapat memfasilitasi pertemuan rutin di mana masyarakat dapat berkumpul untuk belajar bersama, berbagi tips, dan mendiskusikan tantangan yang mereka hadapi dalam menggunakan aplikasi. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya belajar dari instruktur, tetapi juga dari satu sama lain, yang dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan mereka.

Selain itu, penting untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses edukasi. Kerjasama antara pemerintahan Kota Lhokseumawe, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintahan Kota Lhokseumawe, dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya meningkatkan literasi digital masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan dapat menyelenggarakan program pelatihan yang melibatkan mahasiswa sebagai pengajar, sementara organisasi non-pemerintahan Kota Lhokseumawe dapat membantu menjangkau masyarakat yang kurang terlayani. Dengan melibatkan berbagai pihak, program edukasi dapat menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan. (Engkus, et al, 2019)

Evaluasi juga merupakan bagian penting dari proses edukasi. Setelah program edukasi dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur efektivitasnya. Ini dapat dilakukan

melalui survei untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai materi, metode pengajaran, dan dampak yang dirasakan setelah mengikuti program. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan program edukasi di masa mendatang, sehingga dapat lebih baik memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penting untuk menyadari bahwa edukasi mengenai penggunaan aplikasi teknologi informasi adalah proses yang berkelanjutan. Dengan perkembangan teknologi yang cepat, masyarakat perlu terus diperbarui dengan informasi dan keterampilan terbaru. Oleh karena itu, program edukasi harus dirancang untuk bersifat fleksibel dan adaptif, sehingga dapat menanggapi perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia teknologi. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dan mampu memanfaatkan aplikasi teknologi informasi, seperti , untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan publik.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan dan perizinan publik memberikan banyak manfaat yang saling

terkait. Mulai dari peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, hingga penyediaan layanan yang lebih personal dan inklusif. Semua manfaat ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Tentunya diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintahan Kota Lhokseumawe untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem agar manfaat-manfaat tersebut dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

2. Pemeliharaan aspek keamanan siber dalam pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi adalah tugas yang kompleks dan berkelanjutan. Ini membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek teknis, proses, dan manusia. Dengan memperhatikan semua aspek yang telah disebutkan di atas dan terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang keamanan siber, pengembang dapat menciptakan aplikasi yang tidak hanya fungsional dan user-friendly, tetapi juga aman dan terpercaya.

Berikut ini merupakan rekomendasi yang dapat penulis

sampaikan :

1. Pemerintah daerah perlu mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi untuk memfasilitasi proses perizinan usaha. Aplikasi ini harus mencakup semua jenis perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha, mulai dari pendaftaran usaha hingga izin operasional. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengajuan izin dapat dilakukan secara online, sehingga mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan oleh pelaku usaha. Selain itu, aplikasi ini harus dilengkapi dengan fitur pelacakan status pengajuan izin, sehingga pelaku usaha dapat memantau perkembangan permohonan mereka secara real-time.
2. Untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan masyarakat memahami dan dapat memanfaatkan aplikasi yang dikembangkan, pemerintah daerah perlu mengadakan program sosialisasi dan pelatihan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau pelatihan langsung di komunitas. Dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang cara menggunakan aplikasi, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mengajukan izin dan memanfaatkan layanan publik yang tersedia.
3. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi yang mendukung aplikasi pelayanan publik dan perizinan usaha memadai. Ini termasuk peningkatan jaringan internet, penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan, serta pelatihan bagi pegawai pemerintah yang akan mengelola aplikasi tersebut. Dengan infrastruktur yang baik, aplikasi dapat berfungsi dengan optimal dan memberikan layanan yang cepat dan efisien kepada masyarakat.
4. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap perizinan usaha, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis data yang terintegrasi dengan aplikasi perizinan. Sistem ini harus mampu mengumpulkan dan menganalisis data terkait pelaku usaha, jenis izin yang diberikan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya data yang akurat dan terkini, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaksanaan izin usaha, serta mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan pelanggaran.
5. Pemerintah daerah harus membangun kolaborasi yang kuat dengan berbagai stakeholder, termasuk asosiasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan akademisi, untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam pengembangan dan implementasi aplikasi pelayanan publik dan perizinan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
6. Percepatan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) adalah sebuah konsep yang diperkenalkan di Indonesia untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara lebih efisien dan terintegrasi. MPP

adalah pusat layanan yang menggabungkan berbagai jenis layanan publik dari berbagai instansi atau lembaga pemerintah dalam satu lokasi. Berikut adalah beberapa elemen kunci dari kebijakan Mall Pelayanan Publik:

1. Integrasi Layanan

MPP mengintegrasikan berbagai layanan publik dari berbagai instansi pemerintah, seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan lainnya, dalam satu tempat. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan tanpa harus berpindah-pindah tempat.

2. Kemudahan Akses

Dengan menggabungkan berbagai layanan dalam satu lokasi, MPP mengurangi kebutuhan masyarakat untuk mengunjungi berbagai kantor pemerintah yang berbeda. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan atau memiliki keterbatasan waktu.

3. Peningkatan Efisiensi

MPP dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam penyampaian layanan publik. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, proses pengurusan dokumen dan perizinan bisa dilakukan lebih cepat dan lebih akurat.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan

MPP berfokus pada peningkatan kualitas layanan dengan menerapkan standar pelayanan yang jelas, menyediakan fasilitas yang memadai, dan memastikan bahwa petugas layanan memiliki kompetensi yang sesuai.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Kebijakan MPP mendorong transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan waktu layanan. Selain itu, adanya sistem pengaduan dan umpan balik memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah atau ketidakpuasan.

6. Penggunaan Teknologi

MPP sering memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses layanan, seperti sistem antrian elektronik, aplikasi layanan online, dan sistem manajemen data terintegrasi.

7. Partisipasi Publik

Kebijakan MPP juga mencakup aspek partisipasi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan evaluasi layanan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terakomodasi dengan baik.

8. Fasilitas dan Infrastruktur

MPP dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang tunggu, area

konsultasi, dan fasilitas penunjang lainnya untuk menciptakan pengalaman layanan yang nyaman bagi masyarakat.

Contoh Implementasi MPP

Beberapa contoh Mall Pelayanan

Publik yang ada di Indonesia

termasuk:

• **Mall Pelayanan Publik Banda**

Aceh di Pusat Pasar Aceh

• **Mall Pelayanan Publik**

Takengon di Kabupaten Aceh

Tengah

• **Mall Pelayanan Publik Langsa**

di Kota Langsa

Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, lebih

(BLU). Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri

Lhokseumawe. Vol.7 No.1

Aswin, & Sofyan, M. M. (2022).

Dinamika Pelaksanaan

Electronic Governance

Pemerintahan Kota

Lhokseumawe Daerah Di

Indonesia. Kebijakan: Jurnal

Ilmu Administrasi, 13(1), 68.

Badan Strategi Kebijakan Dalam

Negeri. (2022). Pedoman Umum

Penilaian dan Pemberian

Penghargaan Innovative

Government Award &

Penjelasan Teknis Indikator

Indeks Inovasi Daerah.

Kementerian Dalam Negeri, 1.

Bahtiar, R., Myrna, R., & Susanti, E.

(2021). Digital Government

Dalam Pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor Berbasis

Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa

Barat (SAMBARA) di Jawa

Barat. Kolaborasi: Jurnal

Administrasi Publik, 7(2), 232.

Bilyastuti, M. P. (2019). Pelayanan

Publik Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten

Ponorogo Dengan SIJITU

(Sistem Informasi Perizinan

Terpadu). Reformasi, 9(1).

Biro Humas Kementerian Kominfo.

(2022, April 14). Terapkan

Strategi Inklusif, Kominfo

Dorong Kolaborasi untuk

Percepat Transformasi Digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. S., & Rahman, A. (2022). Public Service Innovation Population Administration Service System in Inland and Border Areas North Kalimantan (SIPELANDUKILAT). *KnE Social Sciences*, 2022, 33–48. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10926>
- Andalisto, D., Saragih, Y., & Ibrahim. (2022). Analisis Kualitatif Teknologi 5G Pengganti 4G di Indonesia. *Jurnal Edukasi Elektro*, 06(1), 01–09.
- Arifai, M, et al. (2024). Pemodelan Instrument Tools Sebagai Penilaian Kinerja Politeknik Negeri Lhokseumawe Untuk Menjadi Badan Layanan Umum

- Kementerian Komunikasi Dan Informatika.
- Castro, C., & Lopes, C. (2022). Digital Government and Sustainable Development. *Journal of Knowledge Economy*.
2021. El-Haq, I. M. (2022). Penerapan Teknologi Informasi Dalam Birokrasi Publik di Kantor Desa Kebonagung. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(04).
- Engkus, Trisakti, F., Hidayat, A., Suparman, N., & Ludianingsih, U. (2019). Kualitas Pelayanan Perpustakaan Berbasis Radio Frequency Identification (RFID). *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 34.
- Engvall, T., & Flak, L. S. (2022). Digital Governance as a Scientific Concept. In Y. Charalabidis, U. of the Aegean, & G. Samos (Eds.), *Scientific Foundations of Digital Governance and Transformation concepts, approaches and challenges* (p. 25). Springer.
- Faedlulloh, D., Maarif, S., Meutia, I. F., & Yulianti, D. (2020). Birokrasi dan Revolusi Industri 4.0: Mencegah Smart ASN Menjadi Mitos dalam Agenda Reformasi Birokrasi Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(3).
- Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(2), 116.
- Gati, R. A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di DPMPTSP Kota Bandung. *Journal If Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 4(1).
- Hayat. (2020). Paradigma Good Governance Menuju Shared Governance Melalui Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 8(1).
- Islami, M. J. (2021). Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs). *Jurnal Komunika*, 10(1).
- Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi e-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 21.
- Koran Sindo. (2017, November 7). Sipeka Jadi Solusi Banten Gaet Investor. *Sindo News.Com*. <https://daerah.sindonews.com/berita/1255322/174/sipeka-jadi-solusi-banten-gaet-investor>
- Lestari, N. W. N. D. (2019). PENGARUH ORIENTASI TEKNOLOGI DAN ORIENTASI PASAR TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN. *E-Jurnal*

Manajemen Ubud, 8(11), 6700–
6720.

Mahmud, T. A. (2020). Implementation of E-Government Policy in Banten Province. 1st International Multidisciplinary Conference on Education, Technology, and Engineering (IMCETE 2019).